



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kegiatan Program Reformasi Birokrasi berjalan lancar, perlu ditetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Jepara Nomor 12/HK.03.1-BA/KPU-Kab/3320/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA . . .

- KEDUA : Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain:
1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
 2. Semua unsur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggungjawab;
 3. Menciptakan birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang professional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
 4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disosialisasikan melalui berbagai media sosial kepada pihak internal dan eksternal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 08 Februari 2022

9HI 5 ? CA =G=D9A =@< 5B 'I AI A
? 56I D5H9B `>9D5F5ž

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

HX'

GI 67< 5B 'NI < F=

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022
 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
 REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2022**

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
1.	Manajemen Perubahan	Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022	Februari
		<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) penyusunan rencana aksi tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Rencana aksi tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
		Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pejabat dan pegawai untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan <i>kick off</i> / pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
		Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	Tersedianya media sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan kerja yang bisa diakses <i>stakeholder</i> internal dan eksternal	Februari

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Pembangunan menu Reformasi Birokrasi satuan kerja di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
		Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu dan ASN	Tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
		Penyelenggaraan integritas di lingkungan kerja	Tidak adanya pelanggaran disiplin ASN di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
			Penandatanganan pakta integritas komisioner KPU dan ASN	Januari
			Pelaporan LHKPN komisioner dan sekretaris KPU serta LHKASN bagi ASN	Januari-Maret
			Dokumen laporan penanganan benturan kepentingan dan dokumentasi surat pernyataan bebas benturan kepentingan	Februari
			Deklarasi pencaanangan zona integritas satuan kerja	Januari
			Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di satuan kerja	Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Jepara
		Diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian		Februari
		Pembangunan instrument <i>reward and punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	Tersedianya instrument <i>reward and punishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Agustus, Desember

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Januari
		Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Agen Perubahan	April, Agustus, Desember
		Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi	Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) unit	April, Agustus, Desember
		Melakukan pelaporan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja	Terlaksananya penyampaian laporan kepada tim Reformasi Birokrasi KPU RI yang terdiri dari pembentukan tim, rencana aksi, dan LKE	Februari
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan	Pemetaan produk hukum di lingkungan satuan kerja	Adanya sosialisasi dan terlaksananya pemetaan data produk hukum di lingkungan satuan kerja	Januari dan Desember
		Penyusunan revisi produk hukum	Jumlah produk hukum yang telah direvisi	Januari-Desember
		Penyusunan produk hukum yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan satuan kerja	Jumlah produk hukum yang telah disahkan	Januari-Desember
		Pembangunan JDIH	Dapat diaksesnya JDIH satuan kerja	Januari-Desember
		Pengelolaan JDIH	Updatenya JDIH satuan kerja	Januari-Desember
3	Penataan Organisasi/	Pembuatan dokumen struktur organisasi unit/satuan kerja	Struktur organisasi unit/satuan kerja	Februari

No.	Area Perubahan	Sub-Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
	Kelembagaan			
4	Penguatan Tata Laksana	Penyusunan SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level) ke dalam SOP	Januari-Desember
			Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	Januari-Desember
			SOP sudah dilegalkan	Januari-Desember
			Seluruh SOP telah diterapkan	Januari-Desember
		Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	Januari-Desember
		Tata kelola PPID di lingkungan unit/satuan kerja	Adanya kebijakan pendukung PPID	Januari
			Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan alur permohonan informasi oleh <i>stakeholder</i>	Januari-Desember
			Meningkatnya kepuasan layanan PPID	Januari-Desember
			Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindaklanjuti	Desember
			Dokumen jumlah sengketa informasi	Desember
Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID	Desember			

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Dokumen indeks kepuasan permohonan informasi	Februari
		Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan	Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan	Maret
			Terisinya data aplikasi manajemen perencanaan	Januari-Desember
			Terisinya data aplikasi penganggaran	Januari-Desember
			Terisinya data aplikasi manajemen keuangan	Januari-Desember
			Terisinya aplikasi manajemen kinerja	Januari-Desember
			Persentase pengadaan melalui aplikasi pengadaan	Januari-Desember
		Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan	Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan	Januari-Desember
			Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui	Januari-Desember
			Penggunaan aplikasi kepemiluan	Januari-Desember
			Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik	Desember
			Data jumlah pemohon melalui aplikasi PPID satuan kerja oleh publik	Desember
		Penerapan sistem arsip	Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Jepara kerja sama dengan Kantor Arsip Daerah	Januari-Desember
			Terdokumentasinya arsip vital	Januari-Desember
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	Penerapan pengukuran kinerja individu	Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	Januari-Februari
			Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (target output / mutu / waktu / biaya)	Januari-Februari
			Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP	Januari-Februari
		Penerapan <i>assesment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	Data mutasi	Desember
			Data promosi	Desember
			Data peserta <i>assesment</i>	Desember
		Penerapan disiplin dan kode etik penyelenggara pemilu	Data jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	Desember
			Data jumlah pelanggaran tahun ini	Desember
			Data jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	Desember
		Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN	Januari-Desember
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja	Desember
			Data jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Desember
		Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Data jabatan yang sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan	Desember

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
		Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Januari-Desember
		Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Data jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	Desember
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penetapan Kinerja	Adanya dokumen penetapan kinerja	Januari
		Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Dokumen penetapan program, kegiatan, dan anggaran	Januari
			Dokumen laporan kinerja	Januari
			Dokumen laporan realisasi anggaran	Januari dan Desember
	Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Januari-Desember	
		Pengukuran capaian kinerja unit/satuan kerja	Dokumen laporan capaian kinerja	Januari-Desember
		Pelaporan kinerja unit/satuan kerja	Pelaporan kinerja tepat waktu	Januari-Desember
		Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin	Terisinya aplikasi E- Lapkin	Januari-Desember
		Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas kinerja	Data jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan	Desember
Pengelola PPBJ bersertifikat	Desember			
7	Penguatan Pengawasan	Perencanaan zona integritas di Lingkungan Unit/Satuan Kerja	Terbentuknya Tim Zona Integritas	Januari
		Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan satuan kerja	Ditandatanganinya pakta integritas oleh para pihak	Januari

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Adanya rencana kerja zona integritas yang sudah dilegalkan	Januari
		Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam rencana aksi zona integritas	Januari-Desember
			Persentase kegiatan yang terlaksana di dalam rencana aksi zona integritas	Desember
		Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit/satuan kerja	Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas	April, Agustus, Desember
			Persentase pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan zona integritas	April, Agustus, Desember
			Melaporkan pembangunan zona integritas dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan	Desember
		Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKEZI)	Terisinya LKE zona integritas	Desember
		Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
		Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi	Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
			Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
			Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Februari
		Public campaign anti gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Februari

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
		Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi	Laporan pengendalian gratifikasi	Februari
		Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan unit/satuan kerja	Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan	Februari
		Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi komisioner KPU dan ASN	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja	Februari
		Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan benturan kepentingan	Dokumen penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan	Februari
		Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan benturan kepentingan	Desember
		Pelaksanaan SPIP	Terbitnya SK tim SPIP pada satuan kerja	Januari-Desember
		Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan SPIP	Terselenggaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern	Januari-Desember
		Pembangunan sistem pengaduan masyarakat di lingkungan unit/satuan kerja	Pelaporan buku kendali tepat waktu	Januari-Desember
			Tersedianya sarana penyampaian pengaduan	Januari-Desember
			Adanya pejabat yang mengelola pengaduan	Januari-Desember
			Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan	Januari-Desember
		Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan unit/satuan kerja	Dokumen laporan pengaduan masyarakat	Januari-Desember
		Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat di lingkungan unit/satuan kerja	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat	April, Agustus, Desember
		Penyampaian LHKPN	Laporan persentase seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan unit/satuan kerja	Januari
		Pengelolaan pengadaan barang/jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 Tahun 2018	Desember
		Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengelolaan pengadaan barang/jasa	Laporan pengadaan barang/jasa	Desember
8	Pelayanan Publik	Memetakan jenis-jenis/produk-produk pelayanan administrasi internal kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait kepemiluan)	Terbitnya SK daftar informasi publik	Januari
		Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Januari
			Indeks kepuasan layanan yang didapat melalui survei pelayanan	Januari
			Data sengketa pelayanan	Januari

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
			Adanya akses pengaduan, konsultasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai)	Januari
			Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholder</i> internal dan/ atau eksternal	Januari-Desember
		Menciptakan/melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal kesesuaian persyaratan, kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur, kecepatan waktu penyelesaian, kejelasan biaya/tarif, kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan	Indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan	Januari
			Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan	Januari
			Adanya SOP Pelayanan	Januari
			Informasi kepada publik terkait biaya layanan	Januari
			Informasi jenis-jenis pelayanan kepada internal dan eksternal	Januari
			Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	Januari
		Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik	Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU	Februari-Maret
			Tersedianya Maklumat Pelayanan	Februari-Maret
		Sistem informasi pelayanan publik	Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik	Februari-Maret
		Sarana prasarana dan fasilitas	Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak	Februari-Maret

No.	Area Perubahan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu
		Pelayanan khusus	Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (jalur kursi roda)	Mei
		Pengelolaan Pengaduan	Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan	Januari-Desember
		Penilaian kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan	Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengelolaannya	Februari-Maret
		Atribut Pelayanan berupa kartu identitas petugas, kartu tamu, buku tamu, petunjuk dan arah ruang layanan	Atribut layanan dapat terlihat publik	Februari-Maret
		Pelayanan terpadu satu pintu	Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Januari-Desember
		Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	Meningkatnya partisipasi publik dalam kegiatan kepemiluan	Januari-Desember
		Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward and punishment</i>	Agustus

?9HI 5? CA =G=D9A =@< 5B I AI A
? 56I D5H9B >9D5F5ž

HX'

GI 67< 5B NI < F=

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI